

TESIS
TINJAUAN TERHADAP UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENYELESAIKAN KASUS TRISAKTI SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA BERAT MASA LALU MELALUI JALUR NON YUDISIAL



DIAN PERTIWI SUPRAPTO

No. Mhs.:

225214895

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
2024

TESIS

**TINJAUAN TERHADAP UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENYELESAIKAN KASUS TRISAKTI SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA BERAT MASA LALU MELALUI JALUR NON YUDISIAL**



DIAN PERTIWI SUPRAPTO

No. Mhs.:

224214895

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA

YOGYAKARTA

2024



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Dian Pertiwi Suprpto
Nmr Mahasiswa : 225214895
Konsentrasi : Litigasi
Judul Tesis : TINJAUAN TERHADAP UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN KASUS TRISAKTI
SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT MASA
LALUI MELALUI JALUR NON YUDISIAL

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda tangan

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S. H., LL. M.

27/7-2024

2. Dr. G. Widiartana, S.H., M. Hum.

27/7-2024



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Dian Pertiwi Suprpto
Nomor Mahasiswa : 225214895
Konsentrasi : Litigasi
Judul Tesis : TINJAUAN TERHADAP UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN KASUS TRISAKTI
SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT MASA
LALU MELALUI JALUR NON YUDISIAL

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan Dewan Penguji

Pada tanggal 15 Agustus 2024

Dewan Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

Dr. G. Sri Nurhartanto, S. H., LL. M.

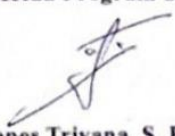
2. Sekretaris

Dr. G. Widiartana, S. H., M. Hum.

3. Anggota

Dr. Yohanes Triyana, S. H., M. Hum.

Ketua Program Studi


Dr. Yohanes Triyana, S. H., M. Hum.

Mengetahui,


Fakultas Hukum


Prof. Dr. Th. Anisa Christiani, S. H., M. Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dian Pertiwi Suprpto

No. Mahasiswa : 225214895

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“TINJAUAN TERHADAP UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN KASUS TRISAKTI SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT MASA LALU MELALUI JALUR NON YUDISIAL”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terndapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 Juli 2024

Yang menyatakan



Dian Pertiwi Suprpto

HALAMAN MOTTO

NULLA TENACI INVIA EST VIA

“Bagi orang yang mau berjuang, tidak ada jalan yang tidak bisa dilewati”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan karunia, rahmat dan kasih sayang-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam bentuk tesis yang berjudul “Tinjauan Terhadap Upaya Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menyelesaikan Kasus Trisakti Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial”.

Penulisan tesis ditempuh dan diselesaikan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan tinggi hukum jenjang strata dua di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan mendapatkan gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, namun dapat terselesaikan dengan baik dikarenakan dukungan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan serta ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S. H., LL. M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta Dosen Pembimbing;
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S. H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta seluruh staf di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
6. Seluruh narasumber;
7. Bapak dan Yungsi kedua orang tua penulis;
8. Pelagia Namesis Gayu dan Paringga Berlianna sahabat penulis;

9. Muhammad Faslukil Ilmidian Shabara, Jayanto Timbang, Albertus Bagas Satria, Dedy Santoso, dan Eunike Seleky sahabat konsentrasi litigasi penulis;
10. Seluruh rekan penulis
11. Seluruh pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kepada seluruh pihak yang membaca. Terima kasih dan selamat membaca.

Yogyakarta, 23 Juli 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dian' followed by a stylized surname.

Dian Pertiwi Suprpto

DAFTAR ISI

TESIS.....	i
PERSETUJUAN TESIS.....	ii
PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Pustaka.....	18
B. Landasan Teori	38
C. Batasan Konsep.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Data Penelitian	48
D. Alat dan Cara Pengumpulan Data Penelitian.....	49
E. Metode Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Pelanggaran HAM Berat di Indonesia	52
B. Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat melalui Jalur Non Yudisial	77
C. Jaminan Perlindungan HAM bagi Korban Peristiwa Trisakti dengan Penyelesaian Jalur Non Yudisial.....	107
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu khususnya di Kasus Trisakti melalui jalur non yudisial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan politik hukum, perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pemerintah menggunakan jalur non yudisial dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu yaitu untuk perlindungan, pemajuan penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara terutama pemerintah, kemudian pelanggaran HAM yang berat masa lalu belum terselesaikan secara tuntas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, serta perlunya upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi untuk mewujudkan penghargaan atas nilai HAM sebagai upaya untuk menjaga persatuan nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu, sebetulnya pemerintah ingin memberikan perlindungan HAM, meskipun upaya penyelesaian non yudisialpun didalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan oleh para keluarga korban. Dalam bagian kesimpulan dipaparkan agar dibentuk Keputusan Presiden baru dalam rangka untuk membentuk tim yang berwenang untuk menjamin dan mengawasi terlaksananya program bantuan yang sudah diluncurkan oleh Tim PKPHAM dan lembaga-lembaga terkait serta dalam rapat yang dilakukan oleh Tim dengan lembaga-lembaga terkait sebaiknya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, tidak dilakukan secara delegasi maupun mandat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian hasil rapat maupun informasi dari pihak yang diberikan mandat atau delegasi kepada pihak yang berwenang dalam hal tersebut sehingga birokrasi tidak terlalu berbelit-belit dan menghasilkan keputusan yang cepat dan tepat.

Kata kunci: Pelanggaran, HAM berat, Peristiwa Trisakti, Non Yudisial

ABSTRACT

This research aims to find out the implementation of the settlement of past gross human rights violations, especially in the Trisakti Case through non-judicial channels. This research uses normative legal research methods with legal political, legislative and conceptual approaches. The results show that the reasons for the government to use non-judicial channels by issuing Presidential Decree Number 17 of 2022 concerning the Establishment of a Non-Judicial Settlement Team for Past Gross Human Rights Violations are as follows For the protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights as the responsibility of the state, especially the government, then past gross human rights violations have not been resolved completely, causing legal uncertainty, and the need for alternative efforts other than judicial mechanisms by disclosing violations that occur to realize respect for human rights values as an effort to maintain national unity. Based on Presidential Decree No. 17 of 2022 on the Establishment of a Non-Judicial Settlement Team for Past Gross Human Rights Violations, the government actually wants to provide human rights protection, even though the non-judicial settlement efforts have not been implemented as expected by the families of victims. In the conclusion, a new Presidential Decree is presented in order to establish a team with the authority to ensure and supervise the implementation of the assistance programs that have been launched by the PKPHAM Team and related institutions, and the meetings held by the Team with related institutions should be conducted by authorized officials, not by delegation or mandate. This is intended to avoid errors in the delivery of meeting results or information from the party given the mandate or delegation to the party authorized in this matter so that the bureaucracy is not too convoluted and produces quick and precise decisions.

Keywords: Violation, Gross Human Rights, Trisakti Incident, Non-Judicial